




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 10 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, Rancangan Perkada dan/atau Peraturan DPRD dan bersifat wajib;
  - b. bahwa dengan diterapkannya Aplikasi e-Perda oleh Kementerian Dalam Negeri, maka pengajuan peraturan gubernur untuk dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri harus memiliki dokumen perencanaan pembentukan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Dfaerah Provinsi Nusa Tanggra timur Tahun 2019 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Rincian Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 JANUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 10 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 14 Januari 2021PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR</b>	<b>ASAL PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Inovasi Daerah	Bappelitbangda
2.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan	Sekretariat DPRD
4.	Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan.	Sekretariat DPRD
5.	Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan	Sekretariat DPRD
6.	Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi
7.	Mekanisme Manajemen Kas berbasis Manual Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah
8.	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021	Badan Keuangan Daerah
9.	Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
10.	Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Daerah

13.	Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Destinasi Wisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan
14.	Pendidikan Berlalu Lintas Sebagai Kurikulum Muatan Lokal Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan
15.	Pelaksanaan Sekolah Menengah Kejuruan Plus 1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny